

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS RUANG LAKTASI DI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**SONYA APRILIA
NIM.07011181823196**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS RUANG LAKTASI DI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG"

Skripsi
Oleh :

Sonya Aprilia
07011181823196

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 03 Agustus 2022

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001

2. Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001

Penguji :

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP.195806091984031002

2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP.196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS RUANG LAKTASI DI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Sonya Aprilia

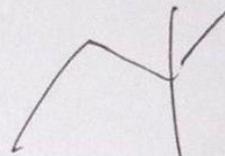
07011181823196

Pembimbing I

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si

NIP.196311061990031001

Tanda Tangan



Tanggal

21 Juli 2022

Pembimbing II

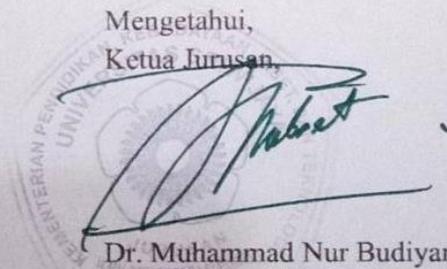
2. Dra. Martina, M.Si

NIP.196603051993022001



26 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

Nip. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonya Aprilia
Nim : 0701118182396
Tempat dan Tanggal Lahir : Manna, 13 April 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Fasilitas Ruang
Laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengilahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembuatan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Sonya Aprilia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup Kita Memang Tidak Sempurna. Tapi Kita Bisa Membuatnya Lengkap Dengan Selalu Berterima Kasih”

(Tere Liye)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

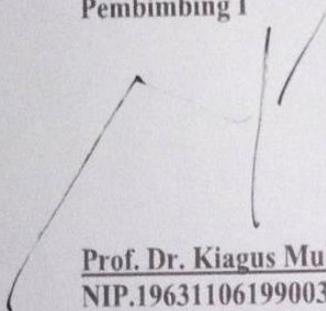
- 1. Kedua Orang Tua Saya**
- 2. Saudara dan Saudari Saya**
- 3. Sahabatku Terkasih**
- 4. Almamater Kebanggan**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Latar belakang masalah penelitian ini ialah ruang laktasi yang disediakan oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang ini tidak terurus selama masa pandemi dan ruangan itu juga diahli fungsikan menjadi gudang penyimpanan oleh staf dan pegawai disana, sementara pegawai perempuan memerah ASI di tempat kerja mereka, ruang laktasi yang disediakan juga jauh dan sulit di capai oleh pegawai serta tidak dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan intruksi yang ada di dalam peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari kebijakan penyediaan ruang laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teori *Randall B. Rippley dan Grance A. Franklin* yang terdiri dari Tingkat kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikendaki. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Dari hasil analisis data, Implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Sekretariat Daerah belum sesuai dengan kebutuhan pegawai, dimana ruangan tersebut belum berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, serta masih ditemukan beberapa masalah dari pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang laktasi ini. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Sekretariat Daerah Kota Palembang diharapkan membuat Peraturan mengenai penyediaan ruang laktasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan adanya pengawasan dalam penyediaan ruang laktasi.

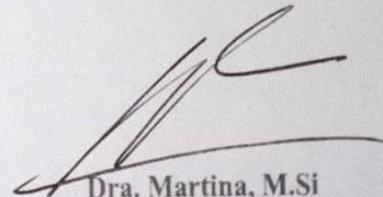
Kata Kunci : Penyediaan, Ruang, Laktasi, di Sekretariat Daerah

Pembimbing I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001

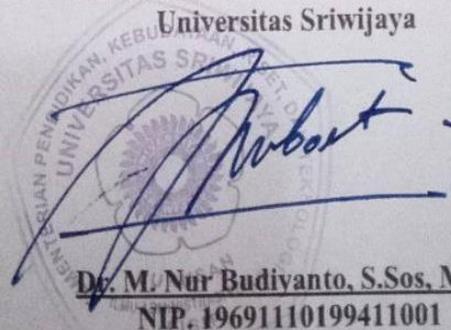
Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001

Indralaya, 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos, MPA
NIP. 19691110199411001

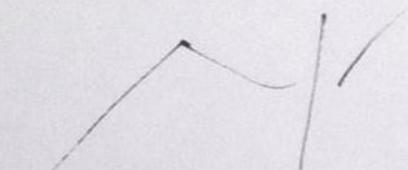
ABSTRACT

This study examines the implementation of the policy for the provision of lactation space at the Regional Secretariat of Palembang City. The background to the problem of this research is that the lactation room provided by the Regional Secretariat of Palembang City was not maintained during the pandemic and the room was also expertly used as a storage room by the staff and employees there, while female employees expressed breast milk in their workplace, the lactation room provided also far and difficult to reach by employees and not equipped with equipment that is in accordance with the instructions in the regulations. The purpose of this study was to find out how the implementation of the policy for providing lactation rooms at the Regional Secretariat of Palembang City. This study uses the theory of Randall B. Rippley and Grance A. Franklin which consists of the level of compliance, the smooth implementation of routine functions, the realization of the desired performance and impact. The type of research used is descriptive with qualitative research methods. From the results of data analysis, the implementation of the policy for providing lactation rooms at the Regional Secretariat has not been in accordance with the needs of employees, where the rooms have not run according to their functions and objectives, and there are still some problems from the implementation of this policy for providing lactation rooms. From the results of this study, it is recommended that the Palembang City Regional Secretariat is expected to make regulations regarding the provision of lactation rooms and cooperate with related agencies, such as the Palembang City Health Office, and the existence of supervision in the provision of lactation rooms.

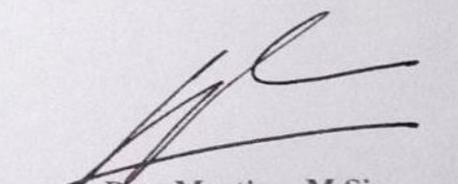
Keywords: Provision, Space, Lactation, at the Regional Secretariat

Advisor I

Advisor II



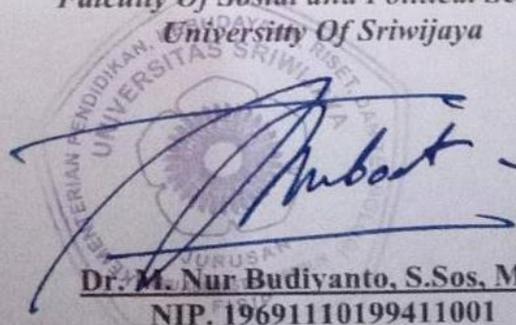
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001



Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001

Indralaya, 2022

Chairman Of Departement Public Administration
Falculty Of Sosial and Political Science
University Of Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 19691110199411001

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya penulisan dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Fasilitas Ruang Laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis dengan sepenuh hati menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Ayah tercinta Mawardi Kasan dan Ibu Tersayang Dahlia Gustini yang tak pernah lelah mendoakan penulis agar selalu diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan dukungannya selama ini, terutama kakak-kakakku Mardiana, Gusti Herawati, Nopita Sari, Bambang, Lucky Saputra dan Dori Saputra.
3. Rektor Universitas Sriwijaya bapak Prof.Dr.Ir.H. Anis Saggaff, MSCE., IPU.
4. Prof. Dr. Alfitri., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Periode tahun 2018-2022.
6. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode tahun 2022-2026.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dari awal sampai selesai pembuatan Skripsi ini.
9. Dra. Martina, M.Si selaku pembimbing 2 yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dari awal sampai selesai pembuatan Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Drs. Ratu Dewa, M.Si selaku Sekretariat Daerah Kota Palembang.
12. Seluruh Pegawai dan Staf Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan kurnia-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Indralaya, September 2022
Punulis,

Sonya Aprilia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined. ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SIGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Kebijakan publik	9
C. Tahap - Tahap Dalam Kebijakan Publik	10

D. Implementasi Kebijakan	10
E. Teori Implemtasi Kebijakan	11
F. Penyediaan Ruang Laktasi Di Sekretariat Daerah.....	16
G. Teori Implementasi Yang Digunakan	19
H. Penelitian Terdahulu	20
I. Kerangka pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Aspek Penelitian.....	27
C. Definisi Konsep.....	28
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Unit Analisis Data	31
F. Informan Kunci.....	32
G. Jenis dan Sumber Data.....	32
H. Teknik Pengumpulan Data.....	33
I. Teknik Analisis Data	34
J. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum.....	38
B. Hasil dan Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai di Sekretariat Kota Palembang.....	4
Tabel 2. Pegawai perempuan berstatus ibu menyusui Di Sekretariat Daerah tahun 2021 sampai 2022.....	5
Tabel3. Jumlah pegawai di Sekretariat Daerah pada masa usia subur dan menopause.....	5
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 5. Fokus Penelitian.....	30
Tabel 6. Mantriks Standar dan Syarat Penyediaan Ruang Laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	55
Tabel 7. Jumlah pegawai bestatus ibu menyusui.....	58
Tabel 8. Presentasi pemberian ASI Eksklusif.....	66
Tabel 9. Rekap Hasil Anasis dan Temuan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tata Ruang Kantor Walikota Palembang.....	6
Gambar 2. Ruang Laktasi/ Nursery Room.....	17
Gambar 3. Ruang Laktasi/Nursery Room.....	18
Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin.....	20
Gambar 5. Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 6. Kantor Walikota Palembang.....	39
Gambar 7. Lambang Pemerintah Daerah Kota Palembang.....	40
Gambar 8. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	42
Gambar 9. Tampak ruang laktasi di Sekretariat Daerah yang penuh dengan barang dan tidak dilengkapi dengan fasilitas.....	53
Gambar10. Bentuk ruagan laktsi yang ada di pukesmas dan tempat umum	55
Gambar 11. Tampak ruang laktasi di Sekretraiat Daerah.....	57
Gambar12. Data nama pegawai berstatus ibu menyusui dari data cuti bersalin.....	59
Gambar 13. Data lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang sudah mempunyai ruang laktasi di Kota Palembang.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas
- Lampiran 2: Surat Keputusan Skripsi
- Lampiran 3: Surat Izin Penelitian ke Sekretariat Daerah Kota Palembang dari Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 4: Surat Izin Penelitian ke Dinas Kesehatan dari Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 5: Surat Balasan Izin Penelitian dari Sekretariat Daerah Kota Palembang
- Lampiran 6: Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Palembang
- Lampiran 7: Pedoman Wawancara
- Lampiran 8: Matriks Wawancara/ Hasil Wawancara
- Lampiran 9: Dokumen Data Jumlah Pegawai Cuti Bersalin
- Lampiran 10: Dokumen Data Nama Instansi dan Jumlah Ruang Laktasi di Kota Palembang
- Lampiran 11: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif
- Lampiran 12: Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu
- Lampiran 13: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013
- Lampiran 14: Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing I
- Lampiran 15: Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing II
- Lampiran 16: Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing I
- Lampiran 17: Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing II
- Lampiran 18: Lembar Revisi Seminar Proposal
- Lampiran 19: Lembar Pembimbing Skripsi
- Lampiran 20: Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif
- Lampiran 21: Pedoman Observasi
- Lampiran 22: Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 23: Form II
- Lampiran 24: Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Sekretariat Daerah
- Lampiran 25: Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Dinas Kesehatan

DAFTAR SIGKATAN

ASI	: Air Susu Ibu
ASN	: Aparatur Sipil Negara
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
HAM	: Hak Asasi Manusia
KEMENKES	: Keputusan Menteri Kesehatan
PERDA	: Peraturan Daerah
PERWALI	: Peraturan Walikota
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SETDA	: Sekretariat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-Undang
<i>UNICEF</i>	: <i>United Nations Children's Fund</i>
<i>WHO</i>	: <i>World Healty Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang menuju negara maju, yang mana masih berupaya melakukan peningkatan di berbagai sektor-sektor pembangunan dalam negeri. Salah satu bentuk dari perkembangan dan kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pembangunan-pembangunan di berbagai aspek yang menjadi pendukung dari kemajuan suatu negara. Mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun aspek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Salah satu kota yang bergerak maju dilihat dari fasilitas infrastruktur dan aspek pendukung lainnya adalah Palembang. Selain infrastruktur Palembang juga meningkatkan pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat itu tidak lepas dari kualitas pegawainya, dimana semakin berkualitas pegawai tersebut, maka pelayanan yang diberikan akan bagus dan dapat diterima oleh masyarakat. Berkualitasnya suatu pegawai itu tidak dilihat dari gender antara laki-laki dan perempuan, karena kedudukan antara laki-laki dan perempuan sekarang sama. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dimana bisa memiliki karier yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan perempuan juga bisa bekerja dan menikah. Selain meningkatkan kualitas pelayanan Palembang juga berupaya untuk meningkatkan angka pemberian ASI Eksklusif, seperti yang kita ketahui bahwa pemberian ASI di Indonesia masih terbilang rendah. Untuk itu pegawai perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak masih bisa bekerja seperti sebelumnya, dan mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan air ASI

kepada anak mereka dari usia 0-6 bulan atau 0-2 tahun. Yang mana sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama pada bayi, karena ASI memiliki nilai protektif dan nutrisi yang tinggi dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi bertujuan mengurangi angka anak kurang gizi, pencegahan kematian dini pada bayi serta meningkatkan kehangatan dan kedekatan emosi pada ibu dan bayi. Seperti yang dikatakan oleh dokter Marturia Inriani Aruperes, bayi yang diberikan ASI Eksklusif sejak dini umumnya akan lebih cerdas daripada bayi yang tidak diberikan ASI. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari *Thousand Days*, *UNICEF*, dan *WHO* manfaat pemberian ASI sejak lahir hingga usia 2(dua) tahun dapat memberikan nutrisi kepada bayi, meningkatkan sistem imun, meningkatkan perkembangan otak, ibu jadi lebih sehat, menenangkan bayi dan ibu.

Maka dari itu pemerintah mengajak setiap perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak berkewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi mereka. Pemerintah juga membuat kebijakan untuk menyediakan ruang khusus ibu menyusui yang mana tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai penyediaan ruang ASI. Selain Peraturan Daerah Kota Palembang, penyediaan ruang laktasi ini tertera di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 mengenai penyediaan ruang Laktasi sesuai dengan standar, agar pegawai tetap bisa memerah ASI dengan nyaman dan aman, karena menurut salah satu dokter di Priyama Hospital Tangerang, ibu dokter Marturia Inriani Aruperes pemberian ASI Eksklusif itu bersifat wajib karena mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selain itu ada beberapa kebijakan yang telah Pemerintah siapkan untuk mendukung program ASI Eksklusif diantaranya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 mengenai penyediaan ruang khusus untuk ibu menyusui, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif di Indonesia. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian ASI Eksklusif pada bayi dilakukan selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih yang disandingkan dengan Makanan Pendamping ASI (M-PASI). Ruang laktasi ini juga tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 yang berbunyi :

“Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja, dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat penyimpanan ASI perah.”

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberian ASI Eksklusif. Pemerintah Kota Palembang menginstruksikan kepada setiap dinas dan pusat keramaian, seperti mall, stasiun, bandara, rumah sakit, dan perusahaan yang berdiri di Palembang diwajibkan menyediakan ruang laktasi untuk karyawan yang akan menyusui bayinya. Apabila melanggar, maka akan ada sanksi tegas, dan apabila ada pihak yang menghalangi pegawainya untuk melakukan pemberian ASI/memerah ASI akan dikenakan sanksi. Seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 di dalam BAB IX terdapat sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin. Dan juga seperti tertera pada BAB XI ketentuan pidana jika ada yang melakukan pelanggaran dimana seperti tertera dibawah ini:

“ setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 13, pasal 14 ayat (1), pasal 15, pasal 16 ayat(1), Pasal 18 ayat(1) dan pasal 25 ayat(1) dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah)”

Seperti yang telah di instruksi kan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Pemerintah Kota Palembang bawah instansi Pemerintahan yang ada di Palembang harus mempunyai ruang laktasi untuk dimanfaatkan oleh para pegawai perempuan. Sekretariat Daerah Kota Palembang juga ikut mendukung kebijakan dari pembangunan ruangan laktasi di tempat kerja atau kantor. Di Sekretariat Daerah Kota Palembang sendiri mempunyai 12 (dua belas) sub bagian dan setiap bagian tersebut hampir semuanya pegawai perempuan.

Tabel 1. Jumlah Pegawai di Sekretariat Kota Palembang

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	
		PNS	NON PNSD
1.	Sekretariat Daerah	1	
2	Asisten Sekda	3	
3	Staff Ahli Walikota	3	
1	Bag. Tata Pemerintah	18	17
2	Bag. Kesejahteraan Rakyat	10	31
3	Bag. Hukum	14	14
4	Bag. Kerjasama	16	6
5	Bag. Perekonomian	10	8
6	Bag. Administrasi Pembangunan	14	8
7	Bag. Pengadaan barang dan jasa	22	7
8	Bag. Sumber Daya Alam	13	6
9	Bag. Umum	35	98
10	Bag. Organisasi	16	10
11	Bag. Protokol dan komunikasi pimpinan	25	35
12	Bag. Perencanaan dan keuangan	19	31
	JUMLAH	219	271
	TOTAL	490	

Sumber : data diolah penulis 2021

Tabel 2. Pegawai perempuan berstatus ibu menyusui di Sekretariat Daerah tahun 2021 sampai 2022

No	Nama Pegawai	Bagian
1.	Alvia nauli Patesco, S.IP	Bagian Umum
2.	Novita Sabarwati, S.STP	Bagian Protokol

3.	Fitriyani, SS	Bagian Protokol
4.	Rully Asri Tamarany, S.H	Bagian Keuangan
5.	Nanda Fisly	Bagian Protokol
6.	Herlina, S.Sos,M.Si	Bagian Protokol

Sumber :

data diolah

penulis, 2022

Tabel 3. Jumlah pegawai di Sekretariat Daerah pada masa usia subur dan menopause

Jumlah pegawai		Keterangan
Di masa subur	menopause	
301	189	Baik pegawai perempuan dan laki-laki

Sumber: dikelola penulis, 2022

Untuk memenuhi Peraturan Daerah Kota Palembang dan terlaksananya kebijakan ini dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang memanfaatkan ruangan laktasi yang sudah disediakan, sedangkan saat ini masih banyak pegawai di Sekretariat Kota Palembang yang tidak menggunakan dan memanfaatkan ruang laktasi itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan observasi awal melalui wawancara secara langsung yang dilakukan penulis bersama salah satu pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palembang, yakni sebagai berikut :

“ Ruang laktasi yang disediakan oleh Pimpinan itu cuma sekedar ruangan biasa, yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Dimana ruangan itu kosong tidak ada peralatan, bahkan kursi dan meja saja tidak disediakan dan ruangan itu menurut saya sangat tidak layak digunakan para ibu untuk memerah ASI” (Wawancara Tanggal 28 Januari 2022).

Dilihat dari hasil wawancara tersebut penulis masih menemukan masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ruang laktasi ini. Mulai dari ruangan yang kosong, tidak layak di gunakan tidak di lengkapi dengan alat penunjang. Misalnya saja di bagian protokol terdapat 3 (tiga) ibu menyusui dengan usia bayi kurang lebih umur 6 bulan. Namun ketiga ibu menyusui itu lebih senang memerah air ASI di dalam ruangan. Padahal Pemerintah Kota Palembang sudah membangun ruang laktasi bagi pegawai untuk memberikan kenyamanan selama bekerja. Namun sangat disayangkan bahwa di Sekretariat Daerah sendiri belum

umum seperti kursi ataupun meja. Untuk saat ini ruangan tersebut dijadikan gudang oleh staf di Sekretariat Daerah”. (Wawancara Tanggal 1 Maret 2022)

Selain itu ruangan laktasi yang sudah dibangun beberapa tahun terakhir ini juga di ahli fungsikan kegunaanya menjadi gudang penyimpanan barang tidak terpakai oleh staf. Hal ini kerana ruangan yang sebelumnya kosong dan tidak di manfaatkan dengan baik oleh karyawati sehingga di ahli fungsikan menjadi gudang. Maka dari itu kenapa perlu dilakukan penelitian tetang apa yang membuat kebijakan tersebut tidak terlaksanakan dan tidak ditunjang dengan prasarana yang lengkap dan pengahli fungsi ruangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Fasilitas Ruang Laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah **“Bagaimana pelaksanaan kebijakan fasilitas ruang laktasi di sekretariat daerah kota palembang”**.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Fasilitas Ruang laktasi di Sekretariat Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan menambah wawasan mengenai kebijakan penyediaan ruang laktasi khusus ibu menyusui atau pemerah ASI serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian

ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan untuk menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Walikota Palembang dan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press
- Mulia, Daffa. 2015. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Daffa Mulia.
- Mufiz, Ali. 2014. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Nugroho, Riant. 2004. *kebijakan publik formulasi,implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Saefullah, Djadja,.dkk. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung

Skripsi

- Fathurracman, fariz. 2018. *Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No.1 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum*. Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Perdana, Ibrayoga Rizki. 2019. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. Palembang: Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- Prasetyo, Novian Sidiq. 2019. *Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No, 38 Tahun 2015 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Lokasi Parawisata Di Kabupaen Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. 2009. Jakarta: Sekretariat website JDIH BPK RI
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif*. 2014. Palembang: Sekretariat website JDIH BPK RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu*. 2013. Jakarta: Sekretariat website JDIH BPK RI

Internet (Jurnal)

- Harianto, dkk. 2018. Manfaat Air Susu Ibu (ASI), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu*, (Online), Vol 1, No. 14, (<https://osf.io/my8dv/download/?format=pdf>, diakses, 2 Februari 2022)
- Safitry, dkk. 2019. Hubungan Kelengkapan Fasilitas Ruang Laktasi Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda Tahun 2019, *Jurnal Kebidanan Politeknik Kesehatan*, (Online), Vol 3, No. 15, (<http://repository.poltekkes-kaltim.ac.id/239/>, diakses 2 Februari 2022)
- Wijaya, Soesanto. 2017. Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Public Health Perspective*, (Online), Vol 6, No. 3, (<https://doi.org/10.15294/ujph.v6i3.11731>, diakses 2 Februari 2022)
- Rini, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Kota Malanag, (Online), Vol 3, No. 1, *Jurnal Aceh Nutrition Journal*, (<http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/an/article/view/97/54>, diakses 2 Februari 2022)